

DAFTAR PUSTAKA

- Bustami. (2011). *Penjaminan Mutu Pelayanan Kesehatan & Akseptabilitasnya*. Jakarta: Erlangga.
- Bustami. (2011). *Penjaminan Mutu Pelayanan Kesehatan & Akseptabilitasnya*. Jakarta: Erlangga.
- Budihardjo, Miriam, 2008, *Dasar – dasar Ilmu Politik*, rev. ed. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Dahlan MS. (2009). *Statistik untuk kedokteran dan kesehatan 4th ed.*, Jakarta: Salemba Medika.
- Gani, A. (2002). *Perencanaan dan penganggaran Kesehatan Terpadu (Integrated Health Planning and Budgeting)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Graham (2011). *Public Sector Financial Management for managers*. Kingston, Canada: Canadem.
- Herkimer. (1998). *Understanding Health Care Budgeting*. Rockville, Maryland : Aspen Publishers, Inc.
- Hansen & Mowen. (2007). *Managerial Accounting*. USA: Thomson South Western
- Haryanto, Sahmuddin, dan Arifuddin, 2007, “Akuntansi Sektor Publik”. Edisi Pertama: Universitas Diponegoro. Semarang.
- Herlambang, Susatyo, (2013). *Pengantar Manajemen (cara mudah memahami ilmu manajemen)*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- J. Salusu. (2006). *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Grasindo. Jakarta.
- Julhiharti, Any. 2014. Analisis Kesiapan Puskesmas Kota Surabaya dalam Penatalaksanaan Penyakit yang Dapat Diselesaikan Secara Tuntas di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebagai Dasar Penyusunan Anggaran. *Tesis*, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.
- Kementrian Kesehatan. (2006). *Pedoman Pengelolaan Peralatan kesehatan di Fasilitas Kesehatan : Depkes RI*
- Kemenkes RI. (2013). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)*. Jakarta: Depkes RI.
- Kemenkes RI. (2014). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2014 tentang Klinik*. Jakarta: Depkes RI.
- Kemenkes RI. (2015a). *Keputusan Menteri Kesehatan No.HK. 02. 02/ Menkes/ 59/ 2015*
- Kemenkes RI. (2015b). *Peraturan Menteri Kesehatan RI No 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi*. Jakarta: Depkes RI.
- Kemenkes RI. (2019). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan*. Jakarta: Depkes RI.
- Kemenkes RI. (2016). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46*

- Tahun 2016 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi*. Jakarta: Depkes RI.
- Mulyadi.(2010). *Sistem Akuntansi*, Edisi ke-3, Cetakan ke-5. Jakarta: Salemba Empat.
- Munandar,M. 2013. *Budgeting: Perencanaan kerja, Pengkoordinasian kerja, Pengawasan kerja*. Yogyakarta : BPF.
- Muninjaya, A.A. Gede. (1999). *Manajemen Kesehatan*.Jakarta: EGC Pajilaya, Alex. (2002). *Modul Mata Ajaran Organisasi Manajemen dan Perencanaan*.Jakarta : FKM UI.
- Nirmala, V., 2016. *Upaya Peningkatan Readiness For Change Dalam Rangka Akreditasi Puskesmas (Studi Kasus di Kabupaten Malang)*. [Tesis] (Universitas Airlangga)
- Notoatmodjo PDS.(2012). *Metodologi penelitian kesehatan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Pedoman Survei Akreditasi FKTP Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Klinik
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik
- Pemerintah Republik Indonesia (2014) Permenkes No 7 Tahun 2014 tentang *Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan*
- Poerwani, SK dan Evie Sopacua. (2006). Akreditasi Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*. Vol. 9 No. 3. hlm: 125-133
- Putri, F. T. S., 2016. Pengaruh Batasan Waktu, *Fee Audit*, Pengalaman, dan Kompetensi Terhadap Penyelesaian Audit. *JRMA*, 20(20), pp. 1-14
- Republik Indonesia.(2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*.
- Republik Indonesia.(2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.

- Robbins, S dan Coulter, M. (2007), *Manajemen*. Edisi Kedelapan. Jakarta : PT Indeks.
- Sulistinah, A., Witcahyo, E. & Sandra, C., 2017. Kajian Kesiapan Dokumen AKreditasi Kelompok Kerja Administrasi Manajemen di Upt. Puskesmas Jelbuk Dinas Kesehatan Kabupaten Jember. E-journal Pustaka Kesehatan, 5(3), pp. 580-587
- Supriyanto, S dan Damayanti, N.A. 2007. *Perencanaan dan Evaluasi*. Surabaya : Airlangga University Press.
- Shim & Siegel. (2009). *Budgeting Basics and Beyond*. New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.
- Watson, K. J., Blackstone, J. H., & Gardiner, S. C., 2007. The Evolution of a Management Philosophy: The Theory of Constraints. *Journal of Operation Management*, Volume 25, pp. 387-402.
- World Health Organization. 2004. *International Statistical Classification of Disease and Related Health Problems Tenth Revision Volume 2* second edition. Geneva: World Health Organization.
- Williams et al. (2002). *Financial and Managerial Accounting*. The McGraw-Hill Companies Inc.